

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK

ABSTRACT

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KAT PENGNTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Peneilitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.7 Lokasi Penelitian	22
1.8 Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Tinjauan Teoretis Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi	
Negara	25
2.1.1 Teori <i>Green Constitution</i> dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945	25
2.1.2 Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi	26
2.1.3 Teori Kewenangan (<i>Authority Theory</i>)	26
2.1.4 Teori Perizinan (<i>Vergunning</i>).....	27
2.2 Tinjauan Umum Pertambangan Mineral dan Batubara.....	28
2.2.1 Evolusi Definisi, Asas, dan Tujuan Pengelolaan Pertambangan di Indonesia	28
2.2.2 Tarik-Menarik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Tata Kelola Pertambangan	31
2.2.3 Konstruksi Hukum Mekanisme dan Syarat Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP)	34
2.2.4 Telaah Mendalam Kewajiban Pasal 96: Signifikansi RKAB dan Kaidah Pertambangan yang Baik	36
2.3 Tinjauan Umum Tata Ruang dan Kawasan Lindung	38
2.3.1 Konsepsi Filosofis dan Yuridis Penataan Ruang di Indonesia	38
2.3.2 Kedudukan Kawasan Lindung sebagai Demarkasi Ekologis Mutlak	40

2.3.3 Implikasi Hukum Pelanggaran Zonasi oleh Entitas Pertambangan	41
2.4 Tinjauan Teoretis Efektivitas Hukum dan Pengawasan.....	42
2.4.1 Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dalam Pusaran Undang-Undang Minerba	42
2.4.2 Diskursus Teori Pengawasan dan Kewenangan Administrasi Negara.....	46
2.4.3 Urgensi Penegakan Hukum Lingkungan dan Tinjauan Empiris Evaluasi Undang-Undang Minerba	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
3.1 Hasil Penelitian.....	53
3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Kasus Posisi Endang Juta.....	53
3.1.2 Paparan Data Mengenai Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Aktivitas Pertambangan CV Galunggung Mandiri	56
3.1.3 Paparan Data Mengenai Kendala-Kendala dalam Mewujudkan Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Aktivitas Pertambangan CV Galunggung Mandiri	61
3.1.4 Paparan Data Mengenai Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3	

Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Aktivitas Pertambangan CV Galunggung Mandiri.....	65
3.2 Pembahasan.....	67
3.2.1 Analisis Mengenai Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Aktivitas Pertambangan CV Galunggung Mandiri	68
3.2.2 Analisis Mengenai Kendala-Kendala dalam Mewujudkan Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Aktivitas Pertambangan CV Galunggung Mandiri	73
3.2.3 Analisis Mengenai Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Efektivitas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Aktivitas Pertambangan CV Galunggung Mandiri.....	78
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Matriks Diskrepansi Data Administratif dan Fakta Empiris CV

Galunggung Mandiri 61